 E-ISSN : 2686-178X

PROSES KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA DI KAWASAN PESISIR SELATAN KABUPATEN BANTUL

Decky Kuncoro[1)] Indrawati[2)]

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin [1)]
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta[2)]
Email: punyadeckykuncoro@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana alam yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Tinggi nya potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu di kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul tersebut membuat pemerintah Kabupaten Bantul melakukan antisipasi dengan memasukkan kebijakan mitigasi bencana dalam kebijakan pembangunan daerah nya ke dalam misi pembangunan kabupaten Bantul. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan mitigasi bencana dibutuhkan komunikasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses komunikasi kebijakan mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bantul. Untuk dapat mendapatkan tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk komunikasi langsung adalah yang paling efektif untuk digunakan. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi terbentuk, serta bertambahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana alam di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul khususnya dalam menghadapi fase tanggap darurat.

Kata kunci: *Komunikasi Kebijakan;Implementasi Kebijakan;Mitigasi Bencana.*

PENDAHULUAN

Kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan potensi bencana pesisir yang termasuk ke dalam kategori membahayakan (tinggi). Tingginya tingkat potensi bencana yang dimiliki oleh kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul disebabkan oleh beberapa hal diantara nya yaitu, kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul berada di jalur penujaman lempeng aktif bumi yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Tidak hanya sebagai jalur penujaman kedua lempeng aktif bumi, kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul juga mmerupakan kawasan yang menjadi perlintasan patahan/sesar aktif (sesar Opak).

Dampak interaksi kedua lempeng yang berada kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul apabila di dominasi oleh gerakan vertikal, dan berasal dari lautan, maka akan berpotensi besar menyebabkan terjadinya tsunami (Wisyanto, 2003). Tidak hanya bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami, adapun beberapa potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul yaitu banjir, gempa bumi, gelombang pasang, erosi sungai, serta abrasi laut (BNPB, 2011).

Sebagai kawasan yang memiliki tingkat potensi bencana yang termasuk dalam kategori tinggi, pemerintah kabupaten Bantul berupaya untuk melakukan pemaduan kebijakan penanggulangan bencana dengan kegiatan pembangunan. Pemaduan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan sebagaimana yang dimaksud yaitu tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten Bantul. Isi kebijakan terkait penanggulangan bencana kabupaten Bantul yaitu "*Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan dan pelestarian lingkungan"*.

Adapun tujuan pemaduan kegiatan pembangunan dengan kebijakan penanggulangan kebencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bantul tersebut yaitu; untuk memantapkan program penanggulangan bencana dengan sasaran pengurangan resiko bencana, serta pengelolaan sarana dan prasarana publik. Segala bentuk kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bantul tersebut, selanjutnya dimasukkan ke dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana salah satunya yaitu tahapan mitigasi bencana.

Agar proses implementasi kebijakan mitigasi bencana yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten Bantul tersebut tidak hanya berupa rencana, dibutuhkan beberapa hal yang dapat menunjang kelancaran proses implementasinya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawsan pesisir selatan kabupaten Bantul adalah komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap seluruh *stakeholder* yang terlibat. Menurut Edward (1980) dalam Nugroho (2012) komunikasi dalam proses implementasi kebijakan dimaksudkan agar seluruh *stakeholders* yang terlibat dapat salintg memahami dan menunjukkan sikap serta memberikan tanggapan pada proses implementasi kebijakan tersebut.

Komunikasi yang kurang baik antar *stakeholders* yang terlibat hanya akan membuat inefektivitas dalam

 E-ISSN : 2686-178X

proses implementasi kebijakan (Nugroho, 2012). Manfaat terlaksananya komunikasi yang baik dalam proses implementasi kebijakan juga akan dapat memberikan informasi dan mengetahui konsekuensi yang akan terjadi kini dan yang akan datang, sehingga setiap *stakeholders* yang terlibat untuk dapat menentukan langkah atau rencana alternatif yang bisa digunakan selama proses implementasi kebijakan.

Tidak hanya dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam proses penanggulangan bencana. Carut marut nya informasi kebencanaan yang diterima oleh masyarakat dapat memunculkan berita (kabar) yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya dapat meresahkan masyarakat terdampak bencana. Komunikasi dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting agar seluruh *stakeholders* yang terlibat dapat mereduksi ketidakpastian, memastikan agar setiap *stakeholders* dapat bertindak secara efektif demi melindungi maupun memperkuat ego yang berkaitan dalam proses interaksi yang dilakukan individu maupun kelompok (Susanto, 2011).

Melihat arti penting komunikasi dalam proses implementasi kebijakan serta dalam tahapan penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses komunikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Bantul dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi kebijakan menurut Edward (1980) dalam (Nugroho (2011) merupakan seluruh hal yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat dari proses implementasi kebijakan tersebut. Tujuan dan sasaran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran maupun seluruh *stakeholders* sehingga akan dapat mengurangi distorsi. Tujuan dan sasaran sebuah kebijakan yang tidak jelasa atau bahkan tidak diketahui kelompok sasaran, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah munculnya resistensi dari kelompok sasaran maupun seluruh *stakehoklders* yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan (Edward, dalam Subarsono, 2012).

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky (1973) dalam Parsons (2005) merupakan sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Pendapat ini didasarkan pada kemampuan setiap *stakeholder* yang terlibat dalam "membangun hubungan" dalam sebuah mata rantai sebab-akibat agar kebijakan yang telah dibuat dapat memberikan dampak kepada kelompok sasaran. Hal-hal yang dijadikan tujuan akhir dari sebuah kebijakan diharapkan akan dapat muncul disaat *policy output* dapat diterima serta dimanfaatkan dengan baik oleh *target groups* sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu untuk diwujudkan.

Implementasi kebijakan secara garis besar dipahami sebagai; upaya memahami proses implementasi adalah bagian dari proses atau siklus sebuah kebijakan (*part of the stage of the policy process*). Dalam hal ini implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses pengelolaan hukum dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki agar kebijakan tersebut dapat mencapai atau mewujudkan tujuannya (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

Mitigasi bencana secara garis besar didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dan bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan (Kings, 2007 dalam Kusumasari, 2014). Tahapan mitigasi bencana dapat dikatakan merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mengurangi konsekuensi yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana. Tujuan dilaksanakannya mitigasi bencana adalah untuk mengurangi kemungkinan risiko, pengurangan konsekuensi risiko, menghindarkan masyarakat dari risiko bencana, penerimaan risiko, serta transfer, pembagian, atau penyebarluasan risiko.

Mitigasi bencana menurut Godschalk et al (1999) dapat dilakukan melalui 2 jenis kegiatan yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan mitigasi bencana yaitu; (1) Mitigasi struktural dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa dan tsunami, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan evakuasi, pembangunan bangunan pelindung pantai (pemecah ombak), vegetasi pantai, dan masih banyak lagi kegiatan fisik yang dibangun dengan tujuan untuk melakukan pengurangan risiko bencana; (2) Mitigasi non-struktural dapat dilakukan dengan penyusunan peraturan perundangan, penyusunan peta rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Disebutkan oleh Sugiyono (2011), penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui obyek penelitian, yang dalam hal ini yaitu komunikasi dalam proses implementasi kebijakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi mitigasi bencana alam wilayah pesisir kabupaten Bantul sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh (*holistic*) karena setiap aspek yang ada dalam implementasi kebijakan mempunyai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penelitian terkait komunikasi dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana alam ini mengambil lokasi di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi penelitian lebih dikarenakan letak geografis kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul, potensi bencana yang terdapat di kawasan

 E-ISSN : 2686-178X

tersebut, serta adanya komitmen penanggulangan bencana dari pemerintah daerah kabupaten Bantul sebagaimana yang tertera dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah nya.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana sumber data tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal, bukan untuk melakukan generalisasi data, dimana sampel dalam penelitian ini merupakan sampel teoritis yang disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan (Sugiyono, 2011).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Digunakannya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi penelitian, mengumpulkan informasi baik yang dilakukan melalui observasi dan wawancara (baik yang dilakukan terstruktur maupun tidak), dokumentasi, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2014).

Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan guna mengamati perilaku serta aktivitas yang terjadi di lapangan (Creswell, 2014). Dalam pelaksanaan observasi, peneliti akan melaksanakan observasi yang partisipatif, dimana jenis partisipasi nya lebih bersifat pasif atau dalam hal ini peneliti akan datang ketempat penelitian, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan melakukan *face to face interview* dengan narasumber (Creswell, 2014).

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) dan lebih bersifat terbuka, hal ini lebih disebabkan karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2011).

Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tulisan, laporan, peraturan perundang-undangan, gambar maupun karya-karya lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari pelaksanaan observasi dan wawancara yang digunakan dalam mengumpulkan data (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Kawasan Pesisir Selatan

Implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul hingga saat ini telah berjalan dan terlaksana dengan menyelesaikan beberapa program dan kegiatan. Terdapat dua jenis kebijakan mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul yaitu mitigasi struktural dan non struktural. Adapun bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan kebijakan mitigasi non struktural yaitu (Kuncoro dan Husein 2016):

1. Vegetasi di kawasan pesisir. Program dan kegiatan yang terkait dengan vegetasi di kawasan pesisir kabupaten bantul yaitu dengan melakukan konservasi hutan Mangrove. Hutan mangrove di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul berada di sebelah barat muara Sungai Opak dan di sebelah timur Pantai Samas, atau tepat nya berada di Dusun Baros, Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek. Dilihat secara ekologis, ekosistem hutan mangrove bagi penanggulangan bencana di kawasan pesisir adalah untuk melindungi garis pantai dan kehidupan di belakangnya dari gempuran tsunami dan angin (Karminarsih, 2007).
2. Menjaga kelestarian gumuk pasir di kawasan pantai Parangtritis sebagai salah satu *barrier* alami yang berguna untuk menahan laju arus air ketika terjadi tsunami di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul. Pelestarian di kawasan gumuk pasis pantai Parangtritis dilakukan untuk dapat tetap menjaga ekosistem nya dari kegiatan wisatawan yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata di pantai parangtritis.
3. Penataan PKL di kawasan Pantai Baru Parangtritis. Penataan pedagang kaki lima pada kawasan Pantai Baru Parangtritis bertujuan agar menjaga lokasi usaha masyarakat yang terdapat pinggir pantai. Penataan PKL di sepanjang pantai di kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul disebabkan oleh tingkat kemiringan garis pantai serta ketinggian daratan dengan air yang kurang dari 7 meter;
4. Pembangunan jalur evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul dengan mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul tahun 2010-2030. Pembangunan jalan jalur evakuasi ini dilakukan agar proses evakuasi menjadi lebih lancar dan mengurangi hambatan yang bisa saja terjadi pada saat terjadi bencana.

Implementasi kebijakan mitigasi non-struktural yang dilaksanakan pada kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul adalah berupa perencanaan tata ruang dan wilayah kabupaten Bantul.

Perencanaan tata ruang dan wilayah. Rencana tata ruang dan wilayah pesisir kabupaten Bantul diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Dalam rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Bantul merupakan gambaran rencana pemanfaatan wilayah kabupaten Bantul.

Penetapan rencana tata ruang dan wilayah terkait mitigasi bencana alam di kawasan pesisir dilakukan

E-ISSN : 2686-178X

dengan menetapkan peta kawasan rawan bencana ke dalam kawasan lindung kabupaten. Peta kawasan rawan bencana sebagaimana yang diatur dalam Perda tentang RTRW kabupaten Bantul terdiri dari;

1. Peta kawasan rawan gempa bumi yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Bantul.

Gambar 1. Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi

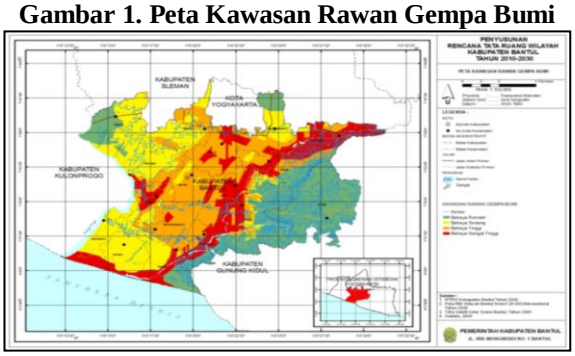

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul 2010-2030

2. Peta kawasan rawan tsunami yang meliputi seluruh wilayah di Kecamatan Kretek, Sanden, Srandakan.

Gambar 2 Peta Kawasan Rawan Tsunami

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul 2010-2030

3. Peta kawasan rawan banjir yang wilayah Kecamatan Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, dan Pleret.

Gambar 3 Peta Kawasan Rawan Banjir

4. Peta kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi, Kecamatan Kretek, Srandakan, Sanden, sebagian Kecamatan Pandak, Pundong, Imogiri, Jetis, Bambanglipuro

Gambar 4. Peta Kawasan Rawan Gelombang Pasang

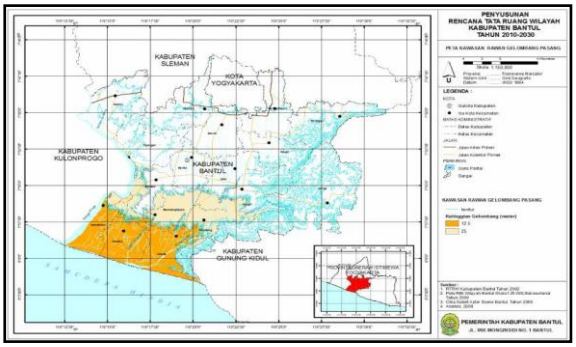

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul 2010-2030

5. Peta Jalur evakuasi bencana wilayah kabupaten Bantul.

Gambar 5. Peta Jalur Evakuasi Tsunami

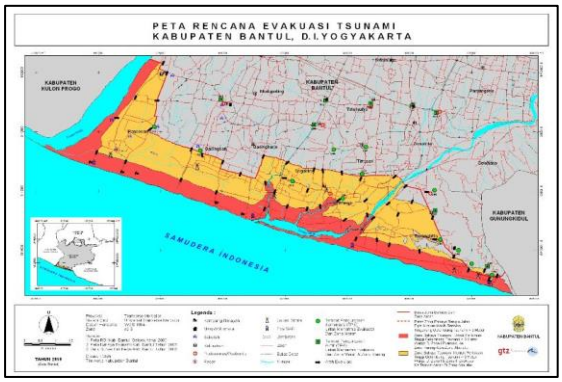

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul 2010-2030

b. Komunikasi Kebijakan Mitgasi Bencana di Kawasan Pesisir Selatan kabupaten Bantul

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2012). Untuk dapat mencapai tujuan nya secara utuh, tidak kurang dan tidak lebih, dibutuhkan sebuah cara yang dapat mendukung nya, salah satunya yaitu dengan melaksanakan komunikasi yang baik, efektif dan efisien. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan mitgasi bencana merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan tidak dapat dikesampingkan keberadaannya. Arti penting komunikasi dalam proses implementasi kebijakan disebabkan karena, kegiatan mitigasi bencana merupakan kebijakan yang dilaksanakan lintas sektor. Keterlibatan lintas sektor yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana menuntut adanya proses komunikasi yang dapat mengontrol individu atau organisasi yang terlibat (Parson, 2011).

Terjalinnya proses komunikasi yang baik akan memberikan dampak pada terciptanya sebuah koordinasi dan keterpaduan yang saling mendukung diantara banyak pihak yang terlibat. Koordinasi serta keterpaduan yang terjalin dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana alam kawasan pesisir akan berdampak pada tercipatanya sebuah kerjasama tim yang baik.

Komunikasi kebijakan yang tercipta dengan baik dalam proses implementasi kebijakan juga dapat meningkatkan kepedulian dan munculnya dukungan

 E-ISSN : 2686-178X

untuk mewujudkan sebuah perubahan dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Komunikasi yang tercipta dengan baik dapat menciptakan sebuah perubahan tertentu, memunculkan respon positif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan, serta kebijakan yang telah disusun dapat terimplementasikan dengan baik (Wibowo, 2011). Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edward didasarkan pada 2 indikator yaitu transmisi dan kejelasan informasinya (Nugroho, 2012).

Proses transmisi (penyampaian informasi) kebijakan mitigasi bencana atau yang lebih dikenal dengan istilah sosialisasi yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Bantul dilakukan dalam 2 cara yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung (Kuncoro dan Husein, 2016). Bentuk sosialisasi langsung yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Bantul dilaksanakan dengan:

1. Forum Musrenbang (Musyawarah Penrencanaan dan Pembangunan) yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten;
2. Dialog interaktif yang diadakan di TVRI stasiun Yogyakarta, dalam acara Taman Gabusan yang tayang setiap selasa pukul 16.00 wib;
3. Dialog atau diskusi terbatas di tingkat desa hingga kabupaten yang dilaksanakan bersama BPBD maupun LSM kebencanaan. Diskusi terbatas sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan melalui FGD (*Focus Groups Discussion*), pertemuan RT, RW, pertemuan Dasawisma, serta beberapa forum kebencanaan yang terdapat di tingkat desa hingga kecamatan.

Gambar 6. Rakor Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 2016

Sumber: Https//bpbd.bantulkab.go.id diunduh pada 27 September 2019

Bentuk sosialisasi tidak langsung yang digunakan pemerintah kabupaten Bantul dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana alam di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul adalah dengan pemasangan poster maupun rambu-rambu sistem peringatan dini yang dipasang di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul. Rambu sistem peringatan dini yang terpasang di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul adalah bentuk nyata upaya membantu masyarakat untuk mengetahui petunjuk atau lokasi berkumpul dalam proses evakuasi pada masa tanggap darurat gempa bumi yang berpotensi tsunami (Kuncoro dan Husein, 2016).

Gambar 7. Peta Jalur Evakuasi Potensi Tsunami

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2016

Bentuk sosialisasi langsung dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana di wilayah pesisir selatan kabupaten Bantul dalam penyebarluasan informasi bertujuan untuk dapat menyerap aspirasi yang datang dari masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat, sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung mengetahui kebutuhan maupun keluhan yang berasal dari masyarakat yang selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan tindak lanjut.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul juga merupakan upaya untuk pemerintah untuk mendapatkan dukungan masyarakat, sehingga akan berdampak pada terlaksananya kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul (Kuncoro dan Husein, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012) bahwa bentuk sosialisasi langsung akan dapat menjamin kebijakan dapat berjalan dengan lancar tanpa resistensi yang berarti dari masyarakat.

Dari bentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung yang digunakan pemerintah kabupaten Bantul dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul, bentuk sosialisasi langsung adalah cara yang paling efektif untuk dapat mengkomunikasikan kebijakan. Bentuk sosialisasi langsung yang paling efektif dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana khususnya yang dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*), pertemuan tingkat desa maupun forum terbatas yang dilaksanakan oleh BPBD bersama dengan LSM.

Efektifitas kegiatan sosialisasi langsung yang dilaksanakan dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul utamanya disebabkan adanya penyertaan kegiatan pedidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan bencana alam di kawasan pesisir khususnya yang terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan yang disertakan dalam proses sosialisasi langsung kepada masyarakat tidak hanya menghasilkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masyarakat, akan tetapi

 E-ISSN : 2686-178X

juga menghasilkan dokumen terkait pengurangan resiko bencana. Beberapa dokumen sebagaimana dimaksud yaitu berupa dokumen Rencana Aksi Desa (RAD), dan dokumen Rencana Aksi Komunitas (RAK). Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAD dan RAK merupakan dampak positif dari sosialisasi langsung, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul telah memandang masyarakat di kawasan pesisir selatan sebagai subjek kebijakan mitigasi bencana kawasan pesisir selatan.

Pandangan bahwa masyarakat pesisir selatan kabupaten Bantul merupakan subjek dari sebuah kebijakan lebih didasarkan pada munculnya kepercayaan dari pemerintah pada masyarakat sebagai kelompok rentan yang akan merasakan dampak dari bencana. Tidak hanya bentuk kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat, pelibatan masyarakat juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pandangan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah ini didasarkan pada pendapat Wang dan Wart (2007) dalam Keban (2008) yang mengemukakan bahwa, ketika masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam proses implementasi, maka masyarakat akan memandang bahwa pemerintah akan bersikap jujur dan tidak ada penipuan di dalam implementasi kebijakan, pemerintah dekat dengan masyarakat, dan yang terutama adalah tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah.

Tidak hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, proses sosialisasi langsung yang digunakan pemerintah merupakan upaya pemerintah kabupaten Bantul untuk mengurangi resistensi yang dilakukan masyarakat selama proses implementasi kebijakan. Terkait resistensi yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan, Potts dan LaMarsh (2004) dalam Wibowo (2011) menyatakan bahwa, untuk dapat mengurangi penolakan dari masyarakat dalam implementasi kebijakan, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan informasi secara langsung pada masyarakat. Informasi yang benar dan akurat yang disampaikan secara langsung, akan dapat menghentikan dsas-desus merugikan yang berkembang di masyarakat, serta mengurangi waktu yang akan dihabiskan untuk berspekulasi tentang permasalahan yang terjadi.

Transmisi dalam komunikasi kebijakan bukanlah satu-satunya hal yang mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan. Kejelasan informasi dalam proses komunikasi kebijakan juga merupakan hal yang mendapatkan perhatian. Arti penting kejelasan informasi dalam proses implementasi kebijakan di kawasan pesisir selatan tidak hanya didasarkan pada pada kebutuhan informasi tentang tujuan dan sasaran kebijakan. Kebutuhan akan kejelasan informasi juga disebabkan adanya keterlibatan lintas sektor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Ketidakjelasan informasi dalam proses implementasi kebijakan dapat menyebabkan kesimpangsiuran informasi yang pada akhirnya menyebabkan setiap sektor akan menggunakan sudut pandang nya untuk mengimplementasikan kebijakan. Kejelasan informasi dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul bisa didapatkan melalui rapat teknis, rapat koordinasi, rapat evaluasi, peraturan perundangan yang telah diterbitkan, maupun SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Terkait kejelasan informasi dalam proses komunikasi kebijakan, Agustino (2012) mengemukakan bahwa kejelasan informasi yang dimiliki oleh implementor kebijakan merupakan modal awal untuk dapat memahami tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan. Kejelasan informasi dalam proses implementasi kebijakan juga berfungsi sebagai sebuah instruksi bagi para implementor mengenai apa yang sebenarnya diharapkan untuk dilakukan, serta menetapkan prioritas yang harus dilakukan para implementor (Tachjan, 2009).

KESIMPULAN

Kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul terlaksana melalui program dan kegiatan yang meliputi mitgasi bencana struktural dan non struktural. Bentuk mitigasi struktural yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Bantul berupa; vegetasi di kawasan pesisir selatan, menjaga kelestariaan gumuk pasir di kawasan Pantai Parangtritis yang merupakan *barrier* alami, penataan PKL di kawasan Pantai Baru Parangtritis. Sedangkan bentuk mitigasi non-struktural bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul adalah berupa di sahkannya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan dipengaruhi oleh komunikasi yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Bantul. Komunikasi yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dari kedua jenis komunikasi yang digunakan tersebut, komunikasi langsung merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif untuk digunakan.

Bentuk komunikasi langsung yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan mitigasi yaitu:

1. Forum Musrenbang (Musyawarah Penrencanaan dan Pembangunan) yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten;
2. Dialog atau diskusi terbatas di tingkat desa hingga kabupaten yang dilaksanakan bersama BPBD maupun LSM kebencanaan. Diskusi terbatas sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan melalui FGD (*Focus Groups Discussion*), pertemuan RT, RW, pertemuan Dasawisma, serta beberapa forum

 E-ISSN : 2686-178X

kebencanaan yang terdapat di tingkat desa hingga kecamatan.

Tidak hanya efektifitas, komunikasi langsung yang digunakan pemerintah kabupaten Bantul dalam proses implementasi kebijakan juga berimbas pada munculnya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah, bertambahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana alam pesisir khususnya untuk menghadapi fase tanggap darurat.

REFRENSI

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Cetakan ke 3. Alfabeta.

BNPB. 2011. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta.

Creswell, John M. 2014. *Research Design pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Edisi 3 Cetakan 4. Pustaka Pelajar.

Godschalk, David R., Timothy Beatley., Philip Berke., David J, Brower., Edward J, Kaiser. 1999. *Natural Hazard Mitigation : Recasting Disaster policy And Planing*. USA. Island Press.

Karminarsih, Emi. *Pemanfaatan Ekosistem Mangrove bagi Minimasi Dampak Bencana di Wilayah Pesisir*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. Volume XIII (3). Hal 182-187.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.

Kuncoro, Decky., Rahmawati Husein. 2016. *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Alam Di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015*. Prosiding *Interdisciplinary Student Conference* 2nd. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 107-115.

Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta. Gava Media.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. 2012. Edisi 4. Jakarta. Gramedia.

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy ; Pengantar Teori dan Praktik Analisis* Kebijakan. Cetakan ke 4. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta. Gava Media.

Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Cetakan VI. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Cetakan-1. Alfabeta.

Susanto, Eko Harry., et al. 2011. *Komukasi Bencana*. Yogyakarta. ASPIKOM, Buku Litera, PERHUMAS, dan BPC.

Tachjan. 2009. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Wibowo, Mardi. 2001. *Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) Untuk Penataan Kawasan Pantai (Kasus Pantai Parangtritis Dan Sekitarnya)*. Jurnal Teknologi Lingkungan Volume 2, Nomor 2, Mei. Halaman 159-167.

Wisyanto. 2003. *Analisis Potensi Bahaya Tsunami Di Pantai Selatan Jawa Timur Melalui Identifikasi Kemiripan Bentuk Tapchan*. Jurnal Alami, Volume 8, Nomor 2. Halaman 33-38.